

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Tentang Kebijakan *Full Day School*

Sebuah lembaga pendidikan dapat menjalankan berbagai aturan yang dibuat dengan hal tersebut tidak terlepas dari kebijakan yang diterapkan pula. Dengan kebijakan yang diterapkan dapat menjadikan sebuah kemajuan karena telah diterapkannya hal tersebut, dimana semua itu yang dapat berjalan dengan baik dengan hasil yang baik pula. Sehingga sebuah kebijakan tersebut dikatakan berhasil adanya.

Menurut William N. Dunn, tentang pengertian kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat.¹⁶ Kebijakan diharapkan bersifat umum tetapi tanpa menghilangkan ciri lokal yang spesifik. Dimana sebuah kebijakan harusnya memberi peluang diinterpretasikan sesuai kondisi spesifik yang ada.

Dengan sebuah ketepatan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang menaatinya. Kebijakan merupakan suatu ketetapan yang membuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

¹⁶ Serli Ani, "Implementasi Program Jaring (Jangkau, Sinergi dan *Guideline*) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Provinsi Lampung Tahun 2016", *Jurnal Administrasi*, 1 (Januari-Juni, 2017) 102.

Tujuan dari kebijakan itu sendiri dibutuhkan untuk sebuah kebaikan yang harusnya rasional dapat dipahami dan diterima, diinginkan karena kepentingannya untuk orang banyak sehingga mendukung semua pihak. Realistis dalam arti semua benar tidak mengada-ada karena hal ini sebagai bukti kebenaran. Serta informasi yang digunakan harus cukup lengkap dan benar karena dimana suatu kebijakan menjadi tidak tepat jika didasarkan pada informasi yang tidak benar.

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadikan garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan satu pekerjaan. Kepemimpinan dalam pemerintahan atau organisasi pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau masuk dalam garis pedoman dalam mencapai sasaran.¹⁷

Kebijakan merupakan sebuah proses pembuatan keputusan-keputusan penting sebuah organisasi berupa identifikasi program atau pengeluaran peraturan agar dapat dijalankan, dan pemilihan pengaturan tersebut yang akan berdampak terhadap berbagai komponen yang dipengaruhi lainnya.¹⁸

Sejalan dengan pernyataan diatas, maka Fredrick memberikan pengertian kebijakan yaitu serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam satu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.¹⁹

¹⁷ Ibid., 103.

¹⁸ Subarsono, A. G, *Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 5.

¹⁹ Sholih Maudi, "Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik", *Jurnal Review Publik*, 2 (2016), 197.

Namun kebijakan itu sendiri adalah serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak-pihak terkait sebagai tahapan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi untuk mencapai tujuan tertentu.²⁰

Kebijakan adalah suatu respon atas peristiwa yang terjadi untuk mencapai keseimbangan dari permasalahan yang sama dan mencapai kesepakatan agar mendapatkan sebuah tujuan yang terbaik serta dapat menjadikan berbagai pihak yang bersangkutan mendapatkan perilaku yang sepadan atas apa yang telah di usahakan bersama.²¹

Menurut Wahab, kebijakan adalah tindakan sadar yang berorientasikan pada pencapaian tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang dilakukan secara acak dan kebetulan.²²

Kebijakan dalam teori Merilee S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Dalam variabel tersebut mencakup sejauh mana kepentingan kelompok sasaran tertuang dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran, sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, penempatan lokasi program yang sudah tepat, sebuah kebijakan yang telah menyatakan pelaksanaan secara detail dan sebuah program di dukung oleh sumberdaya yang memadai.²³

²⁰ Ikandar J, *Kapita Selekta teori Administrasi Negara* (Bandung: Puspaga, 2012), 2.

²¹ Abdul Ramdhani, "Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik", *Jurnal Publik*, 1 (2017), 4.

²² Wahab, *Pengantar Analisis Implementasi Kebijakan Negara* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 43.

²³ Subarsono, A. G, *Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi.*, 8.

Kebijakan mengenai suatu rencana dan tujuan demi tercapai suatu keinginan yang disusun secara sistematis yang akan menghasilkan sebuah proses kemajuan yang baik. Menurut James E. Anderson, memberikan pengertian kebijakan adalah sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.

Dalam kebijakan yang diusung oleh James E. Anderson juga memiliki beberapa beberapa yang langkah yang menjadi tahap dalam mewujudkan sebuah kebijakan yang optimal dipakai. Berikut adalah beberapa tahapan dalam menjalankannya, yaitu:

1. Private Problem, yaitu sebuah permasalahan internal yang timbul akibat sebuah kebijakan yang dijalankan.
2. Publik Problem, yaitu sebuah permasalahan eksternal yang terjadi akibat dari sebuah kebijakan yang telah dijalankan
3. Issue, yaitu sebuah masalah yang timbul akibat dijalankannya sebuah kebijakan.
4. Systemic Agenda, yaitu perhatian merupakan sebuah penyelesaian yang dilakukan guna menanggulangi sebuah kebijakan yang telah dijalankan.
5. Institusional Agenda, yaitu sebuah evaluasi atau penyelesaian terhadap sebuah kebijakan yang telah dijalankan.²⁴

Kebijakan adalah sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang

²⁴ James E. Anderson, *Public Policy Making*, (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1984), cet. ke-3, h. 3.

kegiatan tertentu, pemahaman ini terkait dengan suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.²⁵

Hal ini sebenarnya menyangkut suatu kebutuhan yang luas, karena kebijakan tidak hanya dipahami sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh kelompok maupun oleh individu yang ada dalam suatu komunitas dalam masyarakat.

Pelaksanaan kebijakan merupakan kegiatan lanjutan dari proses perumusan dan penetapan. Sehingga pelaksanaan kebijakan dimaknai sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik itu oleh individu maupun kelompok. Di wujudkan dengan tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditentukan dalam sebuah kebijakan itu sendiri.

Demikian kebijakan dapat diartikan sebagai usaha untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, sekaligus sebagai upaya pemecahan masalah dengan menggunakan sarana-sarana tertentu dan dalam tahapan waktu tertentu. Karena kebijakan pada dasarnya hanya dijadikan dasar dalam bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang diinginkan yang telah ditetapkan. Dalam halnya sebuah kebijakan dalam lembaga pendidikan yang salah satunya menggunakan kebijakan *Full Day School*.

²⁵ A. Syamsul Alam, "Analisis Kebijakan Publik: Kebijakan Sosial Di Perkotaan Sebagai Sebuah Kajian Implementatif", *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintah*, 03 (Juni, 2012), 81.

Secara etimologi, kata *Full Day School* berasal dari Bahasa Inggris. Terdiri dari kata *full* mengandung arti penuh, dan *day* artinya hari. *Full day* diartikan sehari penuh. *Full day* juga berarti hari sibuk. *School* artinya sekolah. Jadi, arti dari *Full Day School* jika dilihat dari etimologinya berarti kegiatan belajar yang dilakukan sehari penuh di sekolah. Sehari penuh disekolah diawali sejak pukul 06.45 sampai pukul 15.00. Menurut terminologi atau arti secara luas, *Full Day School* mengandung arti sistem pendidikan yang menerapkan pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar sehari penuh, dengan memadukan sistem pengajaran yang intensif yakni dengan menambah jam pelajaran untuk pendalaman materi pelajaran serta pengembangan diri dan kreativitas.²⁶

Menurut Arifin, *Full Day School* merupakan ciri khas sekolah terpadu yang pembelajaran dengan sistem ini mengharuskan sekolah merancang perencanaan pembelajaran dari pagi hingga sore.²⁷

Sedangkan *Full Day School* menurut Bahruddin, menjelaskan bahwa:

“Sekolah sepanjang hari atau proses belajar mengajar yang diberlakukan dari pagi hari sampai sore hari, mulai pukul 06.45-15.30 WIB, dengan durasi istirahat setiap dua jam sekali”.

Sekolah dengan kebijakan *Full Day School* didirikan karena beberapa tuntutan, diantaranya adalah:

²⁶ Mega Swatika Junior, “Rasionalitas Orang Tua Memilih SD Program *Full Day School* Di Kota Kediri”, *Paradigma*, 03 (2015), 2.

²⁷ Endah Wulandari, “Analisis Implementasi *Full Day School* Sebagai Upaya Pembentukan Karakter Siswa Di SD Muhammadiyah 4 Kota Malang”, *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan SD*, 6 (April, 2018), 66.

1. Minimnya waktu orang tua di rumah, lebih-lebih karena kesibukan di luar rumah yang tinggi (tuntutan kerja).
2. Perlunya formalisasi jam tambahan keagamaan karena dengan minimnya waktu orang tua dirumah maka secara otomatis pengawasan terhadap hal tersebut juga minim.
3. Perlunya peningkatan mutu pendidikan sebagai solusi alternatif untuk mengatasi problematika pendidikan. Peningkatan mutu tidak akan tercapai tanpa terciptanya suasana dan proses pendidikan yang representative dan professional.²⁸

Sedangkan menurut Sukur Basuki, *Full Day School* adalah sekolah yang sebagian waktunya digunakan untuk program-program pembelajaran yang suasana informal, tidak kaku, menyenangkan bagi siswa dan membutuhkan kreatifitas dan inovasi dari guru.²⁹

Full Day School adalah suatu sistem yang dilaksanakan sedemikian rupa yang diterapkan dengan kebijakan yang sudah dibentuk dan dirancang agar semakin membuat efektif dan efisien segala jenis kebijakan yang diterapkan. Dimulai dari pagi pukul 06.45 hingga 15.30 WIB dengan intens dari hari Senin hingga Jum'at dengan Sabtu di isi berbagai kegiatan yang diadakan sekolah. Hal tersebut dianggap menunjukkan sebuah keseimbangan pembelajaran di berbagai sekolah yang menerapkan kebijakan ini.

Kebijakan adalah suatu aturan atau tindakan yang diambil oleh berbagai pelaku yang menerapkannya, tidak terlepas dalam dunia pendidikan. Kebijakan dipergunakan untuk mengetahui seberapa besar hasil yang dicapai ketika sebuah kebijakan itu sendiri diterapkan dan dilaksanakan. Kebijakan

²⁸ Baharuddin, *Pendidikan Psikolog Perkembangan* (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2010), 221.

²⁹ Homsa Diyah Rohana, "Pengaruh Sistem *Full Day School* Terhadap Pembentukan Karakter Religius Siswa Kelas V Di SD Nasima Semarang". *Skripsi*. (2017) 22.

yang menjadi tombak dalam menentukan dan mengarahkan semua tujuan agar tercaik dengan baik dan tidak diinginkan adanya sebuah kegagalan.

Penerapan kebijakan *Full Day School* di Indonesia sudah bisa dikatakan menyeluruh penggunaannya, namun terkadang dalam hal penerapannya tersebut juga masih terdapat pro dan kontra karena dianggap masih tidak optimal dalam meningkatkan prestasi belajar. Namun dengan upaya yang selalu dilakukan dan diterapkan di berbagai lembaga pendidikan yaitu di sekolah yang bila penerapan sistem tersebut selalu terus dioptimalkan dan dijalankan dengan baik maka hasil yang akan diperoleh dalam hal prestasi belajar juga tidak akan mengecewakan.

Implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan diubah setelah itu implementasi kebijakan dapat dilakukan. Keberhasilannya ditentukan seberapa besar kebijakan tersebut dapat tercapai sesuai dengan patokan atau penilain awal. Kebijakan mencakup berbagai hal-hal sebagai berikut:

1. Kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan
2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan
3. Persentase perubahan yang diinginkan
4. Kedudukan pembuat kebijakan
5. Pelaksanaan program
6. Dan sumber daya yang ikut andil dalam penerapan kebijakan.³⁰

³⁰ Sholih Maudi, "Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik", *Jurnal Review Politik*, 6 (Desember. 2016), 199.

Menurut Smith, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yaitu:

1. Kebijakan yang ideal yaitu pola pikir yang digagas oleh perumus kebijakan dengan tujuan untuk mendorong, mempengaruhi dan merangsang target group untuk melaksanakannya.
2. Kelompok sasaran yaitu kelompok dimana diharapkan dapat menyesuaikan pola-pola perilaku dengan kebijakan yang telah dirumuskan.
3. Penerapan kebijakan pada kelompok yaitu badan-badan pelaksanaan yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan.
4. Faktor lingkungan yaitu unsur-unsur di dalam lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan seperti aspek budaya, sosial, ekonomi dan politik.³¹

Implementasi sebuah kebijakan adalah titik terakhir dimana apakah kebijakan tersebut berhasil diterapkan atau tidak. Kebijakan yang menjadi suatu jawaban dari permasalahan-permasalahan yang dialami oleh masyarakat. Dalam membuat kebijakan harus melihat serta melakukan kontrol agar kebijakan yang dibuat benar-benar bisa berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan.

Dalam teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier ini dinyatakan bahwa ada tiga hal yang mempengaruhi kesuksesan implementasi suatu kebijakan yaitu sebagai berikut:

³¹ Haedar Akib, "Implementasi Kebijakan", *Jurnal Administrassi Publik*, 1 (2010), 3.

1. Karakteristik dari masalah, sebagai berikut tingkat kesulitan teknis dari masalah yang ada, tingkat pengelompokan dari kelompok sasaran, dan presentase kelompok sasaran terhadap populasi.
2. Karakteristik kebijakan (undang-undang), sebagai berikut kejelasan isi kebijakan, seberapa jauh kebijakan memiliki dukungan teoritis, besar dukungan terhadap kebijakan tersebut, seberapa berpengaruh kebijakan terhadap sasaran yang dituju dan kejelasan, konsisten aturan yang ada pada pembuat kebijakan.
3. Variabel lingkungan, sebagai berikut kondisi sosial ekonomi dan kemajuan teknologi di masyarakat, dukungan masyarakat terhadap kebijakan tersebut, dan tingkat komitmen para pelaksana kebijakan.³²

B. Tinjauan Tentang Prestasi Belajar

Prestasi adalah hasil suatu kegiatan yang telah dikerjakan, diciptakan baik secara individual maupun kelompok. Prestasi tidak akan pernah dihasilkan tanpa suatu usaha baik berupa pengetahuan maupun berupa ketrampilan.³³

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, prestasi berarti hasil yang telah dicapai, dikerjakan maupun dilakukan. Sementara yang dimaksud dengan prestasi belajar yaitu penilaian pendidikan tentang perkembangan dan kemajuan siswa yang berkenaan dengan penguasaan

³² Mening Subekti, "Pengaruh Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi Terhadap Efektifitas Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Di Kecamatan Tambak", *Jurnal Administrasi Publik*, 3 (Desember, 2017), 60-61.

³³ Lisnawati Soapatty, "Pengaruh Sistem Sekolah Sehari Penuh (*Full Day School*) Terhadap Prestasi Akademik Siswa SMP Jati Agung Sidoarjo", *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 2 (2014), 723.

bahan pelajaran yang diberikan kepada siswa. Prestasi belajar merupakan kemampuan nyata yang merupakan hasil interaksi antara berbagai faktor yang mempengaruhi baik dalam maupun dari luar individu dalam belajar.³⁴

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku baik peningkatan pengetahuan, perbaikan sikap, maupun peningkatan keterampilan yang dialami siswa setelah menyelesaikan kegiatan pembelajaran. Hasil belajar yang sering disebut juga prestasi belajar, tidak dapat dipisahkan dari aktivitas belajar, karena belajar merupakan suatu proses, sedangkan prestasi belajar adalah hasil dari proses pembelajaran tersebut. Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak melalui kegiatan belajar.

Prestasi belajar adalah kemampuan dimana siswa dapat memberikan sebuah hasil belajar yang memuaskan dengan berbagai kemampuan yang dimiliki agar memperoleh hasil memuaskan dengan peningkatan kemampuan diri dengan diukur melalui prestasi akademik dan non akademik.³⁵

Dalam kegiatan belajar yang terprogram dan terkontrol yang disebut kegiatan pembelajaran, tujuan belajar telah ditetapkan terlebih dahulu oleh guru, anak yang berhasil dalam belajar adalah anak yang berhasil mencapai tujuan-tujuan pembelajaran. Untuk mendapatkan suatu prestasi tidaklah semudah yang dibayangkan, karena memerlukan perjuangan dan pengorbanan berbagai tantangan yang harus dihadapi.

³⁴ Ibid., 724.

³⁵ Ahmad Najib, "Pengaruh Pendidikan Karakter Terhadap Prestasi Belajar Siswa", *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, 9 (2012), 105.

Penilaian terhadap hasil belajar atau prestasi belajar siswa untuk mengetahui sejauh mana ia belajar, seperti yang dikatakan oleh Winkel yang dikutip sebagai berikut:

“Proses belajar yang dialami oleh siswa belajar menghasilkan perubahan-perubahan dalam bidang pengetahuan dan pemahaman, dalam bidang nilai, sikap, dan keterampilan. Adanya perubahan tersebut tampak dalam prestasi belajar yang dihasilkan oleh siswa terhadap pertanyaan, persoalan, atau tugas yang diberikan oleh guru. Melalui prestasi belajar siswa dapat mengetahui kemajuan-kemajuan yang telah dicapai dalam belajar.”³⁶

Marsun dan Martaniah berpendapat bahwa prestasi belajar merupakan hasil kegiatan belajar, yaitu sejauh mana peserta didik menguasai bahan pelajaran yang diajarkan, yang diikuti oleh munculnya perasaan puas bahwa ia telah melakukan sesuatu dengan baik. Hal ini berarti prestasi belajar hanya bisa diketahui jika telah dilakukan penilaian terhadap hasil belajar siswa.³⁷

Menurut Poerwodarminto, prestasi adalah hasil yang dicapai, dilakukan atau dikerjakan oleh seseorang. Sedangkan prestasi belajar itu sendiri diartikan sebagai prestasi yang dicapai oleh seorang siswa pada jangka waktu tertentu dan dicatat dalam buku rapor sekolah.³⁸

Menurut Azwar, faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar yaitu:

1. Faktor Internal yaitu diantaranya faktor fisik (panca indra dan kondisi fisik umum) dan faktor psikologis (variabel non kognitif meliputi minat,

³⁶ Noor Komari Pratiwi, “Pengaruh Tingkat Pendidikan, Perhatian Orang Tua, Dan Minat belajar Siswa Terhadap Prestasi Belajar Bahasa Indonesia Siswa SMK Kesehatan Di Kota Tangerang”, *Jurnal Pujangga*, 1 (Desember, 2015), 80.

³⁷ Syarif Hidayat, *Manajemen Pendidikan Substansi dan Implementasi dalam Praktik Pendidikan di Indonesia* (Tangerang: Pustaka Mandiri, 2013), 83.

³⁸ Noor Komari Pratiwi, *Pengaruh Tingkat Pendidikan..*, 81.

motivasi, dorongan dalam kepribadian diri dan kemampuan kognitif melalui bakat, minat dan kecerdasan.

2. Faktor Eksternal yaitu diantaranya faktor fisik (tempat belajar, sarana dan prasarana belajar, materi belajar dan kondisi lingkungan belajar) dan faktor sosial (dukungan sosial dan pengaruh budaya).³⁹

C. Tinjauan Tentang Sekolah Dasar

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sekolah adalah bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran. Dimana waktu atau pertemuan ketika murid diberi pelajaran dengan usaha menuntut sebuah kepandaian yaitu ilmu pengetahuan yang diajarkan melalui pelajaran.⁴⁰

Sekolah merupakan wadah untuk membuat siswanya memperoleh prestasi baik akademik maupun non akademik. Setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam meningkatkan prestasinya. Pendidikan khususnya pendidikan formal merupakan sarana dalam membentuk kepribadian anggotanya, termasuk peserta didik.⁴¹

Sekolah merupakan salah satu instansi manusia terpenting, tempat proses belajar mengajar berlangsung. Sekolah menambah pengetahuan anak didik tentang dunia, serta membantu anak didik menyesuaikan diri dengan serap kemajuan dan perubahan cepat yang terjadi dalam kehidupan modern.

³⁹ Postalina Rosida, "Pengaruh Pembelajaran Aktif Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Fisika Pada Siswa Kelas 2 SMU", *Jurnal Proyeksi*, 2 (2011), 92.

⁴⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), 435.

⁴¹ Yuli Rori Rahayu dan Syunu Trihantoyo, "Pengaruh *Full Day School* Dan Pendidikan Karakter Terhadap Prestasi Belajar Siswa SMPIT At-Taqwa Surabaya", *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 1 (2017), 2.

Sekolah juga membantu manusia dalam menikmati seni dan mengembangkan minat serta bakat lain yang membuat waktu senggang lebih berharga. Masa penjajahan Belanda, Sekolah Dasar di Indonesia dikenal dengan nama *Europeesche Lagere School* sedangkan masa penjajahan Jepang dikenal dengan SR (Sekolah Rakyat) dengan awal berdirinya sekolah ketika Indonesia sudah merdeka pada 13 Maret 1946.

Sekolah adalah salah satu program pendidikan formal yang ada di negara Indonesia. Seperti informasi yang ada pada kementerian pendidikan nasional yang menerangkan bahwa Sekolah Dasar merupakan jenjang pendidikan paling dasar yang berjangka waktu selama 6 tahun. Dimulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 Sekolah Dasar. Siswa telah menyelesaikan pendidikan hingga kelas 6 Sekolah Dasar dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya yaitu SMP (sekolah menengah pertama).

Ki Hajar Dewantara, dalam mendefinisikan bahwa setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Sekolah terbaik adalah sekolah jalanan, yaitu sekolah memberikan kebebasan kepada muridnya supaya kreatif. Sekolah adalah hidup hanya menunda kekalahan, tambah terasing dari cinta sekolah rendah dan tahu ada yang tetap tidak diucapkan, sebelum pada akhirnya kita menyerah.⁴²

Bila kaum muda yang telah belajar di sekolah dan menganggap dirinya terlalu tinggi dan pintar untuk melebur dengan masyarakat yang bekerja dengan cangkul dan hanya memiliki cita-cita yang sederhana, maka

⁴² Dewantara Hajar, *Pendidikan*, (Majelis Leuhur Persatuan Taman Siswa, 1962), 14.

lebih baik pendidikan itu tidak diberikan sama sekali. Sesuai dengan peraturan wajib belajar dari pemerintah, khusus untuk Sekolah Dasar peserta didik atau anak sekolah yang dimaksud adalah setiap warga negara Indonesia berusia 7-15 tahun dengan jenjang SD sampai SMP.

Jadi sebuah kebijakan adalah tatanan atau aturan yang dibuat untuk tujuan tertentu baik itu mengikat maupun membebaskan. Dengan menerapkan sebuah kebijakan bertujuan agar mencapai sebuah keberhasilan. Kebijakan yang diimbangi dengan sebuah tatanan yang serius dan benar akan menghasilkan sebuah keberhasilan yang baik pula.

Tidak terlepas dari itu sebuah kebijakan yang terkait dengan lembaga pendidikan pun juga perlu, seperti kebijakan *Full Day School*. *Full Day School* sendiri adalah sebuah sistem pendidikan yang menerapkan pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar sehari penuh dengan memadukan sistem pengajaran yang intensif yakni dengan menambah jam pelajaran untuk pendalaman materi pelajaran serta pengembangan diri dan kreativitas.

Serta dari sebuah hasil penerapan kebijakan *Full Day School* tentunya ada sebuah tujuan yang ingin dicapai dengan memuaskan dan baik tentunya. Salah satunya dalam pencapaian prestasi belajar. Prestasi belajar adalah salah satu tolak ukur dalam mengetahui sebagaimana peserta didik dapat memahami pembelajaran yang diajarkan. Maka dari itu semua hal tersebut dapat dibuktikan melalui prestasi belajar yang meningkat ketika sebuah kebijakan itu juga dijalankan.

Kebijakan *Full Day School* yang dapat dijalankan dengan baik akan berdampak terhadap prestasi belajar yang baik pula. Maka dengan beberapa penjelasan diatas tersebut, maka sebuah lembaga pendidikan hendaklah memiliki sebuah kebijakan dalam menentukan peraturan baik peraturan tata tertib maupun peraturan kebijakan pendidikan.

Dengan diterapkan salah satu sistem kebijakan yaitu *Full Day School* yang sudah banyak diterapkan baik dilembaga pendidikan sekolah dasar hingga jenjang sekolah menengah dimana sebuah kebijakan itu diambil agar mendapatkan sebuah hasil yang memuaskan dalam prestasi belajar baik secara akademik maupun non akademik.